

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dominasi dolar Amerika Serikat (USD) dalam sistem keuangan internasional adalah hasil dari proses sejarah yang panjang dan kompleks. Akar dominasi ini dapat ditelusuri dari sistem Bretton Woods, yang merupakan pencetus utama dalam pembentukan tatanan ekonomi global pasca Perang Dunia II. Dalam konferensi tahun 1944, negara-negara sekutu berupaya menciptakan sistem moneter yang stabil untuk menghindari krisis ekonomi seperti yang terjadi selama periode pascaperang (Frieden, 2015). Sistem tersebut menetapkan dolar AS sebagai satu-satunya mata uang cadangan yang dapat dikonversi ke emas, menjadikannya pusat dari sistem keuangan internasional. Meskipun mekanisme ini dirancang untuk memberikan stabilitas ekonomi, sistem Bretton Woods memiliki kelemahan yaitu menciptakan ketergantungan terhadap kebijakan ekonomi AS dan akumulasi dolar yang tidak seimbang dengan cadangan emas yang dimiliki negara tersebut (Vernengo, 2021).

Pada tahun 1971, Presiden Nixon mengakhiri konvertibilitas dolar terhadap emas. Kebijakan ini menandai berakhirnya Bretton Woods dan lahirnya sistem keuangan internasional di mana dolar tetap dominan tanpa penopang emas (Costabile, 2022). Sejak saat itu, dolar menjadi mata uang utama dalam perdagangan internasional, instrumen *cadangan* devisa global, dan instrumen

keuangan lintas negara (Cohen, 2015). Hal ini memperkuat hegemoni ekonomi Amerika Serikat di tengah sistem ekonomi internasional pascaperang. Posisi istimewa AS telah memberikan berbagai manfaat bagi AS, termasuk biaya pinjaman yang lebih rendah, serta keuntungan dalam memberikan sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang memiliki kepentingan bertentangan dengan AS (Gourinchas, 2021). Sebagai contoh, ketika invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 terjadi, AS dan sekutunya membekukan cadangan devisa Rusia yang disimpan dalam dolar serta memutus akses Rusia dari sistem pembayaran internasional (Drezner, 2021).

Seiring dengan dinamika global dan tantangan struktural ekonomi, seperti meningkatnya defisit anggaran dan perdagangan (defisit kembar), banyak negara mulai mempertanyakan dominasi dolar (JP Morgan, 2025). Kajian mengenai dominasi dolar AS saat ini tidak lagi hanya sebatas diskusi mengenai siklus ekonomi biasa, melainkan menyangkut pergeseran keseimbangan kekuatan global dan dampak strategis dari adanya ketergantungan finansial pada satu mata uang. Tekanan terhadap dominasi dolar tidak hanya didorong oleh keraguan atas kelayakannya secara ekonomi sebagai mata uang global. Faktor pendorong lainnya juga datang dari aspek politik, yakni kekuatan yang diperoleh Amerika Serikat dari status tersebut sekaligus kerentanan yang ditimbulkan bagi negara-negara lain. Kedua aspek inilah yang menjadi inti dari berbagai upaya dedolarisasi (Gürçan, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, narasi tentang dedolarisasi telah menjadi perdebatan keuangan global. Dedolarisasi merujuk pada pengurangan peran dolar

pada tiga fungsi uang, yaitu sebagai penyimpan nilai (store of value), alat tukar (medium of exchange), dan satuan hitung (unit of account) (Cohen, 2015). Pengurangan ini tidak berlangsung merata pada ketiga fungsi tersebut. Dolar masih mendominasi sebagai alat tukar dengan keterlibatan pada sekitar 89,2 persen transaksi valuta asing harian (BIS, 2025). Posisinya sebagai penyimpan nilai justru paling banyak tergerus. Pangsa dolar dalam cadangan devisa internasional turun dari lebih dari 70 persen pada awal abad ke-21 menjadi sekitar 57,80 persen pada kuartal keempat 2024 (IMF COFER, 2025). Penurunan pada fungsi penyimpan nilai inilah yang menjadi indikasi paling jelas dari perubahan struktural yang sedang berlangsung. Pada fungsi satuan hitung, dolar masih paling lekat karena sebagian besar komoditas global tetap dihargai dalam dolar (BIS, 2023).

Negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia semakin rutin menggunakan mata uang domestik mereka dalam transaksi bilateral. Sebagai contoh, lebih dari 90-95% penyelesaian perdagangan antara Rusia dan Tiongkok dilakukan dalam Yuan atau Rubel pada akhir 2023 dan awal 2024 (Greene, 2024), yang berkontribusi pada meningkatnya peran yuan dan rubel dalam perdagangan antarnegara. Arah perkembangan ini menandakan peralihan menuju struktur keuangan global yang lebih beragam, di mana ketergantungan terhadap dolar mulai bergeser ke alternatif lain.

Akan tetapi, upaya menggeser dominasi menghadapi tantangan berat. Dominasi dolar telah terbentuk dan mengakar selama beberapa dekade, sehingga sulit digeser dalam waktu singkat. Faktor-faktor seperti pasar modal Amerika Serikat yang besar dan likuid, penegakan supremasi hukum, sistem hukum yang

dapat diprediksi, komitmen terhadap kebijakan nilai tukar mengambang, serta sistem keuangan yang menyediakan likuiditas dolar dan menjaga transparansi kelembagaan, semuanya memperkuat posisi dolar (Council on Foreign Relations, 2022). Faktor-faktor pendukung ini tidak mudah ditiru mata uang lain, sehingga menciptakan rintangan besar bagi calon pesaing. Hal ini menjelaskan mengapa proses dedolarisasi, sekalipun didorong ketidakpuasan yang semakin besar, kemungkinan besar berjalan bertahap dan membutuhkan waktu panjang.

Sebagai salah satu kekuatan utama yang mencoba menjawab tantangan ini, BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan muncul sebagai kelompok negara yang secara aktif dan terorganisir membangun alternatif terhadap sistem keuangan global yang berpusat pada dolar. Sebelum ekspansinya, BRICS mewakili 42% populasi dunia dan lebih dari 25% PDB global (UNCTAD, 2023). Dengan bergabungnya anggota baru seperti Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia pada tahun 2024 dan 2025, BRICS yang diperluas kini mencakup sekitar 45% populasi dunia dan menghasilkan lebih dari 35% PDB global jika diukur berdasarkan paritas daya beli (PPP) (Carnegie Endowment, 2025). BRICS juga membangun keuangan alternatif melalui pembentukan New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA), sekaligus memanfaatkan infrastruktur pembayaran nasional anggotanya seperti CIPS milik Tiongkok dan SPFS milik Rusia yang beroperasi di luar jaringan SWIFT (Arapova & Lissovlik, 2021). Berbagai langkah strategis tersebut lantas memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kemampuan BRICS dalam menantang dominasi

dolar dan struktur keuangan global yang selama ini berpusat pada negara maju (Kirton & Larionova, 2022).

Dedolarisasi yang dilakukan oleh BRICS menunjukkan dimensi ekonomi-politik yang jauh lebih besar daripada sekadar kebijakan perdagangan. Ini adalah ekspresi dari semangat kedaulatan ekonomi negara berkembang, yang selama ini merasa termarginalkan dalam sistem global (Jash, 2017). Langkah ini mencerminkan aspirasi untuk menciptakan sistem ekonomi multipolar yang lebih representatif terhadap kekuatan dunia saat ini (Uzoma et al., 2024). Sebagai blok negara berkembang, BRICS berbeda dari ASEAN, ALBA, atau kelompok regional lain yang juga menyuarakan isu kemandirian ekonomi. BRICS telah menunjukkan kapasitasnya sebagai blok negara berkembang yang mampu membangun struktur keuangan alternatif secara nyata dan mengintegrasikan kebijakan dedolarisasi ke dalam agenda kerjanya. Oleh karena itu, menjadikan BRICS sebagai studi kasus dalam kajian dedolarisasi global sangat relevan dan penting secara akademik. Blok ini menawarkan pendekatan kolektif yang terorganisasi dalam menghadapi sistem keuangan internasional yang didominasi satu negara.

Upaya dedolarisasi yang dipelopori oleh BRICS menjadi contoh konkret dari pergeseran struktur kekuasaan global, sebuah fenomena yang menjadi salah satu isu penting dalam perdebatan Hubungan Internasional mengenai hegemoni dan multipolaritas. Dedolarisasi yang diusung oleh BRICS menandakan potensi pergeseran struktur kekuasaan global dari tatanan keuangan yang berpusat pada dolar ke sistem yang lebih pluralistik. Sebagian analisis bahkan membaca upaya dedolarisasi ini sebagai bentuk "soft balancing" terhadap hegemoni AS, yakni

upaya mengimbangi dominasi melalui sarana ekonomi dan institusional alih-alih kekuatan militer (Papa & Han, 2025). Upaya-upaya ini juga memperlihatkan dimensi simbolik dan ideologis. Dedolarisasi bukan hanya bentuk proteksi terhadap sanksi, tetapi juga simbol kemandirian ekonomi dan politik negara-negara berkembang terhadap struktur kekuasaan global yang dianggap tidak adil. Oleh karena itu, strategi BRICS penting dipahami untuk menilai dinamika kekuasaan global yang sedang berlangsung, dan bagaimana negara-negara non-Barat mulai membangun tata kelola ekonomi global yang mereka rancang sendiri.

Dengan memperhatikan perkembangan tersebut, kajian terhadap strategi dedolarisasi BRICS bukan hanya mendeskripsikan kebijakan finansial alternatif, tetapi juga berpotensi menjelaskan perubahan struktur kekuasaan ekonomi global. Penelitian ini ditempatkan dalam kerangka kajian Ekonomi Politik Internasional, dengan fokus pada aktor-aktor non-Barat yang membentuk dinamika baru dalam sistem internasional. Hal ini penting secara konseptual sekaligus empiris, di tengah semakin terfragmentasinya sistem keuangan global. Mengingat kompleksitas dan dinamika yang berkembang ini, penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai bagaimana strategi BRICS dalam mengurangi dominasi dolar dapat memengaruhi hegemoni ekonomi Amerika Serikat dalam tatanan keuangan global.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini mempertanyakan “Bagaimana strategi BRICS dalam mengurangi dominasi dolar memengaruhi hegemoni ekonomi Amerika Serikat dalam tatanan keuangan global?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai dinamika perubahan struktur ekonomi global dalam konteks dominasi dolar Amerika Serikat dan munculnya inisiatif dedolarisasi oleh BRICS. Penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana konfigurasi kekuasaan dalam sistem keuangan internasional berkembang dan membuka kemungkinan terbentuknya tatanan keuangan yang lebih plural, di mana dolar tidak lagi menjadi satu-satunya kerangka yang tersedia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dominasi dolar Amerika Serikat sebagai bagian dari struktur historis sistem keuangan global, menganalisis konsolidasi BRICS sebagai blok historis yang membangun kapasitas ekonomi dan kelembagaan alternatif, serta menelaah strategi dedolarisasi yang dijalankan sebagai bentuk praktik kontra-hegemoni dalam ranah ekonomi-politik global. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai dampak dari strategi tersebut terhadap posisi ekonomi Amerika Serikat dan konfigurasi kekuatan dalam sistem keuangan internasional.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ekonomi Politik Internasional. Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang membahas peran BRICS dalam sistem keuangan global, terutama dalam konteks upaya mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat. Kajian ini juga menambah wawasan tentang strategi kontra hegemoni dalam ekonomi internasional, yang menjadi bagian dari diskusi globalisasi dan multipolaritas. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti yang ingin mendalami isu terkait pergeseran kekuatan ekonomi dunia serta implikasinya terhadap tata kelola keuangan internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan di negara-negara BRICS dalam merancang langkah-langkah untuk mengurangi dominasi dolar dalam transaksi internasional. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu pelaku usaha dan investor dalam mengantisipasi perubahan kebijakan keuangan global yang memengaruhi arus perdagangan dan investasi. Bagi masyarakat luas, penelitian ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana pergeseran dalam sistem

moneter global dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu pertama berjudul “Navigating the Tides of De-dollarization: Impact on Global Trade and BRICS Initiatives” yang ditulis oleh Rana Al Mosharrafa (2024). Penelitian ini membahas lebih dalam mengenai tren dedolarisasi yang dipromosikan oleh negara-negara BRICS, khususnya di tengah ketegangan geopolitik dan kebijakan ekonomi global yang didorong oleh dominasi dolar AS. Penelitian ini berfokus pada strategi negara-negara BRICS untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan antar negara anggota. Al-Mosharrafa berpendapat bahwa meskipun proses dedolarisasi ini mengalami banyak tantangan besar, seperti kebutuhan membangun infrastruktur baru, inisiatif BRICS memiliki potensi di masa depan untuk menciptakan tatanan moneter yang lebih terdesentralisasi, yang bisa mengurangi pengaruh dominasi dolar dalam perdagangan internasional.

Penelitian terdahulu kedua berjudul “From De-Risking to De-Dollarisation: The BRICS Currency and the Future of the International Financial Order” yang disusun oleh Gao Bai (2023). Gao Bai mengemukakan tiga poin utama yang relevan dengan upaya dedolarisasi dan posisi BRICS dalam merubah sistem keuangan internasional. Pertama,

Gao Bai menjelaskan bahwa upaya BRICS dalam mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS bertujuan untuk meningkatkan kedaulatan dan mengurangi risiko yang disebabkan oleh dominasi dolar dalam tatanan keuangan global. Gao Bai juga menyebutkan Rusia memiliki peran penting dalam mendorong agenda dedolarisasi terutama karena negara ini merasakan dampak besar dari sanksi ekonomi yang diberikan. Penelitian ini juga membahas tentang pentingnya teknologi dan infrastruktur keuangan baru dalam mendukung dedolarisasi. BRICS yang mulai mengembangkan infrastruktur keuangan berbasis teknologi seperti blockchain dan mata uang digital, untuk menggantikan sistem perbankan tradisional dan bergantung pada sistem dolar, dianggap sebagai langkah yang memiliki potensi di masa depan untuk menciptakan alternatif pembayaran yang tidak bergantung pada dolar AS. Namun, Gao Bai berargumen bahwa kecil kemungkinan Renminbi akan menggantikan dolar dalam jangka pendek. Sebaliknya, tren ini lebih mungkin mengarah pada transisi menuju sistem keuangan internasional di mana berbagai mata termasuk dolar, dapat hidup berdampingan atau sistem multikurensi.

Penelitian terdahulu ketiga berjudul “The Multipolar Challenge: Implications for Dollar Dominance and the Shifting Tides of US Hegemony” yang ditulis oleh Efe Can Gürcan (2024). Pembahasan penelitian ini berfokus pada pergeseran dunia yang menjadi lebih multipolar. Penelitian ini membahas bagaimana multipolaritas akan mengubah tatanan ekonomi global dan geopolitik, dengan negara-negara

yang sebelumnya bergantung pada sistem yang didominasi oleh AS, kini berupaya untuk menciptakan sistem pembayaran alternatif. Penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih beragam. Gurcan berargumen bahwa meskipun pergeseran ini memberikan peluang dalam mengurangi dominasi dolar, terdapat tantangan utama yang terletak pada perbedaan politik dan ekonomi antar negara-negara yang berusaha untuk mewujudkan multipolaritas tersebut.

Penelitian terdahulu keempat berjudul “BRICS plus : A New Global Economic Paradigm in the Making?” yang ditulis oleh Raul Gouvea dan Margarida Gutierrez (2023). Penelitian ini membahas tentang upaya BRICS dalam memperluas keanggotaannya dengan melibatkan negara-negara baru seperti Argentina, Arab Saudi dan Iran, yang bertujuan untuk memperkuat posisi ekonomi BRICS di panggung global. Ekspansi ini juga berusaha untuk menciptakan keseimbangan yang lebih adil dalam sistem perdagangan internasional yang selama ini didominasi oleh negara-negara Barat. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana BRICS Plus dapat memperluas jaringan perdagangan dan investasi, serta meningkatkan akses ke pasar untuk komoditas strategis seperti energi, pangan, dan bahan mentah. Komoditas ini memiliki dampak besar pada perekonomian global, terutama untuk negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam.

Secara keseluruhan, keempat jurnal ini menunjukkan bahwa meskipun BRICS semakin aktif dalam mengurangi dominasi dolar melalui berbagai strategi, dolar masih tetap memiliki posisi dominan dalam sistem keuangan global. Faktor-faktor seperti stabilitas mata uang, koordinasi antaranggota, dan tantangan regulasi menjadi kendala utama dalam percepatan dedolarisasi. Namun, tren ini mencerminkan dinamika ekonomi global yang mengarah pada sistem moneter yang lebih beragam, di mana sentralitas dolar sebagai kerangka tunggal mulai berkurang.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kekosongan penting dalam literatur yang perlu diisi. Tinjauan pustaka sebelumnya menunjukkan bahwa pembahasan mengenai dedolarisasi BRICS berfokus pada penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan pengembangan sistem keuangan berbasis teknologi. Pendekatan ini menempatkan dedolarisasi dalam kerangka teknis dan ekonomi, tanpa mengelaborasi lebih jauh dimensi politik yang melatari strategi tersebut. Penelitian ini akan menyajikan analisis yang lebih mendalam dengan lebih memahami dedolarisasi bukan hanya sebagai fenomena moneter, melainkan juga sebagai alat politik dalam kontestasi kekuasaan global. Perspektif ini memberikan kontribusi penting dalam memahami relasi kuasa dalam ekonomi internasional yang selama ini cenderung direduksi pada angka-angka ekonomi semata.

Literatur yang ditinjau juga masih belum menggunakan pendekatan teoritis kritis yang sistematis dalam menganalisis dedolarisasi sebagai bentuk resistensi terhadap hegemoni global. Penelitian ini kemudian hadir

dengan menggunakan pendekatan Teori Kritis Cox sebagai kerangka utama untuk menjelaskan dinamika dedolarisasi. Dengan menggunakan konsep-konsep seperti “blok historis”, “kontra hegemoni” “struktur historis”, studi ini berupaya memperkuat dasar ideologis dan institusionalnya untuk menantang dominasi dolar.

Selain itu, sebagian besar kajian masih berfokus pada pertanyaan apakah Renminbi atau mata uang bersama BRICS mampu menggantikan dolar. Pertanyaan seperti ini menyamakan keberhasilan BRICS dengan munculnya hegemon baru. Penelitian ini mengambil sudut pandang berbeda. Keberhasilan BRICS tidak diukur dari tergantikannya dolar, melainkan dari terbukanya pilihan lain di luar dolar dalam sistem keuangan global. Penelitian ini memposisikan BRICS sebagai kekuatan kontra-hegemonik yang membuka ruang bagi lebih banyak pilihan dalam sistem keuangan global, bukan untuk menggantikan dominasi dolar dengan dominasi mata uang lain.

Aspek lainnya yaitu literatur biasanya hanya mencatat infrastruktur keuangan seperti CIPS, SPFS, dan mata uang digital sebagai alternatif teknis satu per satu, tanpa melihatnya sebagai bagian dari satu strategi yang terhubung. Kajian ini menempatkannya sebagai *war of position*, yaitu penataan kelembagaan yang dibangun secara bertahap untuk menurunkan biaya peralihan dari dolar dan memperkuat posisi BRICS sebagai blok historis tandingan. Tiap instrumen tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dalam upaya kolektif BRICS membangun tatanan alternatif.

Terakhir, implikasi strategi BRICS terhadap hegemoni ekonomi Amerika Serikat sebenarnya sudah disinggung, terutama oleh Gürçan (2024), tetapi pembahasannya masih terbatas pada pergeseran geopolitik yang umum. Studi ini menempatkan implikasi tersebut sebagai turunan dari analisis strategi BRICS melalui kerangka Cox, bukan sebagai pembahasan yang berdiri sendiri tentang Amerika Serikat.

1.5.2 Teori Kritis (Critical Theory) Robert W. Cox

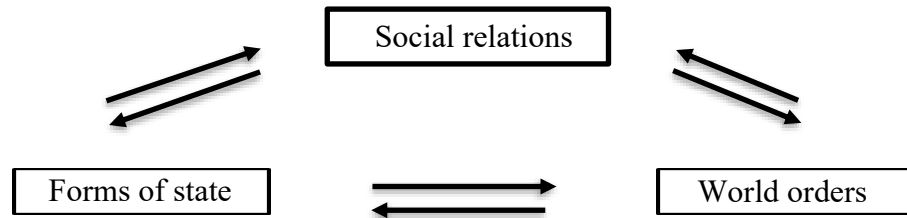
Penelitian ini menggunakan teori kritis (critical theory) Robert W. Cox sebagai kerangka analisis. Cox (1981) menolak anggapan bahwa tatanan global merupakan sesuatu yang wajar dan justru mempertanyakan bagaimana tatanan tersebut terbentuk serta kepentingan siapa yang dilayaninya. Baginya, teori selalu hadir untuk seseorang dan untuk tujuan tertentu (Cox, 1981). Dalam kajian Ekonomi Politik Internasional, teori kritis Cox berfokus pada penerapan pendekatan Gramscian, yaitu kerangka yang mengadaptasi konsep-konsep Antonio Gramsci ke dalam analisis tatanan global.

Pendekatan ini menekankan cara pandang kritis dalam studi Hubungan Internasional, khususnya dalam Ekonomi Politik Internasional (EPI). Berakar pada pemikiran Antonio Gramsci dan dikembangkan oleh tokoh seperti Robert Cox, pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi antara kekuatan material, ide-ide dominan, dan institusi dalam membentuk serta mempertahankan tatanan global (Morton, 2003). Berbeda dengan teori-teori arus utama seperti neorealisme yang cenderung statis, pendekatan

Gramscian Cox melihat kekuasaan sebagai hasil dari proses historis dan sosial yang kompleks.

Salah satu ciri khas pendekatan ini adalah pandangannya bahwa kekuasaan tidak semata bergantung pada paksaan, melainkan juga pada penciptaan konsensus melalui legitimasi ideologis. Pada tataran global, hegemoni dibangun melalui penerimaan luas terhadap sistem yang ada, bahkan oleh aktor-aktor yang sebenarnya dirugikan (Morton, 2007). Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap bentuk kekuasaan yang bekerja melalui ide dan norma. Dedolarisasi dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni ideologis (Gramsci, 1971).

Analisis Gramscian berbasis pada relasi sosial atau *dialectical relation of forces*, yakni hubungan antara kekuatan sosial dalam masyarakat sipil, bentuk negara (*forms of state*), dan tatanan dunia (*world orders*) yang beroperasi dalam dinamika hegemonik (Cox, 1983). BRICS dapat dipahami sebagai upaya kolektif dalam membentuk blok historis baru yang sedang dikonstruksi oleh negara-negara Global South untuk menyaingi tatanan dunia yang berpusat pada Amerika Serikat. Meskipun relasi antar anggotanya penuh kontradiksi, dinamika ini mencerminkan proses dialektis antara kekuatan hegemonik dan kontra-hegemonik (Germain & Kenny, 1998).



Gambar 1. 1 The Dialectical Relation Of Forces

Sumber : Morton, 2003, pp.155

Relasi sosial ini tidak berdiri sendiri, tetapi beroperasi dalam kerangka struktur historis. Robert Cox mengembangkan gagasan ini yang terdiri dari tiga elemen utama : kapabilitas material, institusi, dan ide. Ketiganya saling berinteraksi dan membentuk konfigurasi kekuasaan pada periode sejarah tertentu (Cox, 1981). Struktur historis ini menjadi dasar terbentuknya hegemoni global pada periode tertentu.

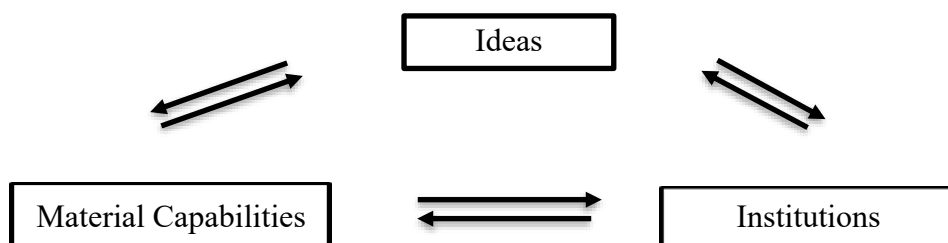
Kapabilitas material mencakup sumber daya produksi, teknologi, dan struktur ekonomi global yang menopang dominasi aktor tertentu. Dominasi dolar AS, misalnya, tidak semata didasarkan pada nilai tukarnya, melainkan juga pada kekuatan ekonomi-politik Amerika Serikat, sistem perbankan global yang terintegrasi, serta kontrol terhadap sistem keuangan internasional (Germain & Kenny, 1998). Institusi seperti IMF, World Bank, dan SWIFT berperan aktif dalam mempertahankan struktur dominan ini.

Ide-ide dominan, seperti anggapan bahwa dolar merupakan simbol stabilitas global, turut memperkuat legitimasi sistem tersebut. Pandangan ini bukanlah sesuatu yang netral melainkan hasil dari hegemoni ideologis yang tertanam dalam “akal sehat” (common sense) internasional (Gramsci, 1971). Kekuatan yang menantang hegemoni dapat membangun narasi tandingan

dengan menawarkan nilai-nilai alternatif sebagai basis legitimasi baru, suatu proses yang Cox pahami sebagai bagian dari dinamika perubahan tatanan global (Cox, 1983).

Struktur historis yang menopang dominasi dolar mencakup keunggulan ekonomi, legitimasi institusional dan dominasi ideologis. Dalam kerangka Cox, perubahan tatanan mensyaratkan pergeseran pada ketiga elemen struktur historis secara bersama yaitu kapabilitas material, institusi, dan ide (Cox, 1981). Dedolarisasi dengan demikian dapat dipahami bukan sekadar langkah teknis, melainkan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengubah konfigurasi kekuasaan global.

Ketiga elemen struktur historis tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling menguatkan dalam suatu konfigurasi yang disebut *dialectical moment of hegemony*. Kondisi ini merujuk pada situasi ketika kapabilitas material, institusi, dan ide beroperasi secara sinergis sehingga menghasilkan tatanan hegemonik yang relatif stabil dan diterima secara luas. Dalam konteks dominasi dolar, ketiga elemen ini bekerja bersamaan ketika kekuatan ekonomi AS sebagai kapabilitas material, IMF dan SWIFT sebagai institusi, serta anggapan bahwa dolar adalah simbol stabilitas global sebagai dimensi ideologisnya. Namun ketika salah satu atau lebih elemen tersebut mulai kehilangan legitimasi atau menghadapi tekanan, ruang bagi kekuatan alternatif mulai terbuka (Morton, 2003).



Gambar 1. 2 The Dialectical Moment Of Hegemony

Sumber : Morton, 2003, pp.156

Upaya pembentukan tatanan alternatif melalui dedolarisasi BRICS menghadapi tantangan struktural maupun politik, mengingat keberhasilan strategi ini tidak hanya bergantung pada kapasitas teknis infrastruktur yang dibangun, tetapi juga pada sejauh mana anggota BRICS mampu mempertahankan arah kebijakan yang konsisten di tengah perbedaan kepentingan domestik masing-masing. Dedolarisasi dipahami sebagai strategi jangka panjang untuk membangun tatanan alternatif yang lebih mewakili kepentingan Global South, baik secara struktural maupun ideologis (Khan, 2023). Upaya ini tidak semata bersifat teknis, melainkan juga menasar perubahan dalam konfigurasi kekuasaan global melalui penggunaan mata uang lokal dan penguatan institusi alternatif seperti New Development Bank (Forough et al., 2023).

BRICS membangun legitimasi baru melalui nilai multipolaritas, kedaulatan, dan keadilan global, bukan sekadar menawarkan solusi kebijakan (Gramsci, 1971). Proses ini dapat dipahami sebagai war of position, yakni perjuangan jangka panjang di ranah ide dan struktur sosial untuk menantang dominasi ideologis (Gramsci, 1971). Strategi dedolarisasi kemudian menjadi bagian dari upaya kontra-hegemonik untuk melemahkan common sense global yang selama ini menopang dominasi dolar

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Struktur Historis

Konsep struktur historis merupakan salah satu fondasi utama dalam pendekatan Gramscian yang dikembangkan oleh Robert W. Cox. Berbeda dengan pendekatan tradisional hubungan internasional yang memandang sistem global sebagai entitas yang bersifat tetap, netral, dan anarkis, konsep struktur historis justru menegaskan bahwa tatanan dunia dibentuk secara dinamis melalui interaksi antara kapabilitas material, ide-ide dominan, dan institusi internasional dalam konteks sejarah tertentu (Cox, 1983).

Struktur historis bukanlah entitas yang bersifat tetap atau semata-mata berkaitan dengan masa lalu, melainkan merupakan hasil dari proses sejarah yang mencerminkan konfigurasi hubungan kekuasaan yang dominan pada periode tertentu. Struktur ini tidak hanya membentuk "kondisi-kondisi kemungkinan" (*conditions of possibility*) bagi tindakan para aktor internasional, tetapi juga menetapkan batasan terhadap pilihan-pilihan politik dan ekonomi yang tersedia bagi mereka. Struktur historis berfungsi sebagai kerangka yang memungkinkan munculnya dominasi hegemonik, sekaligus membuka ruang bagi munculnya resistensi terhadap tatanan global yang berlaku.

Dalam konteks penelitian ini, struktur historis dipahami sebagai konfigurasi kekuasaan global yang dibentuk oleh keterkaitan antara

dominasi ekonomi Amerika Serikat, keberadaan institusi-institusi internasional yang mendukung kepentingannya, serta narasi ideologis yang menjadikan dolar sebagai standar stabilitas global. Ketiganya bekerja secara saling menguatkan dan membentuk kerangka tatanan internasional yang telah berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia II. Konsep ini menjadi relevan untuk menjelaskan mengapa dedolarisasi oleh BRICS bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan bagian dari respons terhadap struktur kekuasaan yang sudah mapan. Struktur historis berfungsi sebagai lensa untuk memahami bagaimana dominasi dolar terbentuk sekaligus bagaimana dominasi itu dapat digeser melalui strategi kolektif yang terorganisasi. Dengan kata lain, struktur historis adalah panggung global tempat pertarungan antara blok historis yang dominan dan gerakan kontra-hegemoni berlangsung.

1.6.1.2 Hegemoni

Hegemoni dalam perspektif Gramscian yang dikembangkan oleh Robert W. Cox merupakan pengembangan dari pemikiran Antonio Gramsci dalam konteks hubungan internasional. Berbeda dari pendekatan realis yang menekankan dominasi melalui kekuatan material semata, Cox memandang hegemoni sebagai fenomena kompleks yang mencakup peran ideologi, konsensus, dan institusi dalam menopang tatanan global tertentu (Cox, 1983). Dengan kerangka ini, kekuasaan bukan sekadar dipaksakan, melainkan juga dibentuk dan dilegitimasi secara sosial melalui berbagai mekanisme non-koersif.

Dalam tatanan global pasca- Perang Dunia II, hegemoni diwujudkan melalui kepemimpinan Amerika Serikat yang membangun sistem ekonomi internasional berbasis dolar serta institusi seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Menurut Cox (1983), hegemoni bertumpu pada dominasi material sekaligus pada kemampuan membangun konsensus melalui ideologi dan institusi internasional. Dominasi Amerika Serikat kemudian dilegitimasi melalui penyebaran nilai-nilai liberalisme ekonomi yang diterima sebagai tatanan yang wajar dalam sistem internasional (Cox, 1987). Keberhasilan hegemoni bergantung pada kapabilitas material sekaligus pada kemampuan membentuk tatanan dunia yang dianggap wajar dan diterima secara luas, sehingga dominasi dilembagakan melalui institusi global dan legitimasi ideologis (Cox, 1992).

Kekuatan hegemonik juga beroperasi melalui normalisasi nilai-nilai tertentu yang menjadikan status quo tampak tidak hanya dominan, tetapi juga “masuk akal” secara global. Narasi seperti stabilitas moneter, pertumbuhan berbasis investasi asing, dan liberalisasi perdagangan dibingkai sebagai solusi universal, padahal pada dasarnya mencerminkan kepentingan aktor dominan. Hegemoni bertahan bukan karena paksaan langsung, melainkan karena diterima sebagai sesuatu yang sah dan fungsional dalam tatanan global.

1.6.1.3 Blok Historis

Dalam kerangka pemikiran Gramscian konsep "blok historis" (*blocco storico*) merujuk pada kesatuan organik dan kompleks antara

struktur (basis material dan relasi produksi ekonomi) dengan superstruktur (ranah institusi politik, hukum, ideologi, dan kebudayaan) dalam suatu formasi sosial pada periode kesejarahan tertentu (Cox, 1983). Ini bukan sekadar aliansi atau koalisi kekuatan politik semata, melainkan sebuah konfigurasi dinamis di mana berbagai kekuatan sosial, institusi, gagasan dominan, dan kapabilitas material saling terkait dan membentuk suatu kesatuan yang utuh, meskipun seringkali diwarnai kontradiksi internal (Gill, 2002). Pembentukan blok historis adalah sebuah proses dialektis di mana berbagai elemen sosial, ekonomi, dan politik berinteraksi untuk menciptakan suatu kesadaran kolektif, "kehendak bersama," atau konsensus yang memungkinkan suatu kelompok sosial memimpin dan menjalankan hegemoni (Gramsci, 1971).

Fungsi utama dari blok historis adalah untuk menopang dan melanggengkan sebuah tatanan hegemonik, di mana suatu kelas atau kelompok sosial dominan berhasil memimpin tidak hanya melalui paksaan (dominasi), tetapi juga melalui persetujuan (konsensus) yang diperoleh dari kelompok-kelompok subordinat. Blok historis menjadi arena di mana "perang posisi" dilancarkan, yaitu perjuangan dalam ranah ideologi, kebudayaan, dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun, mempertahankan, atau menggugat hegemoni tersebut. Namun, stabilitas ini tidaklah abadi. Sebuah blok historis dapat mengalami "krisis organik" ketika terjadi perpecahan fundamental antara struktur ekonomi dan superstruktur ideologisnya, terutama saat kelas penguasa kehilangan

legitimasi dan gagal menjawab aspirasi masyarakat. Krisis inilah yang menciptakan momentum bagi lahirnya blok historis baru.

1.6.1.4 Kontra Hegemoni

Konsep kontra hegemoni berasal dari pemikiran Antonio Gramsci yang melihat bahwa kekuasaan tidak selalu ditegakkan melalui paksaan, melainkan juga melalui persetujuan yang dibentuk secara perlahan lewat institusi sosial, budaya, dan pendidikan. Dominasi seperti ini berjalan secara halus dan menyatu dalam cara masyarakat berpikir dan bersikap, sehingga terasa wajar dan sulit dipertanyakan. Dalam kerangka tersebut, kontra hegemoni dipahami sebagai upaya yang terorganisir untuk menantang nilai-nilai dominan yang sudah mengakar, serta membangun dasar ideologis dan politik alternatif yang berpihak pada kelompok-kelompok yang selama ini tersisih. Proses ini membutuhkan konsistensi dan strategi yang terarah, bukan sekadar reaksi spontan terhadap ketimpangan yang ada (Morton, 2007).

Membangun kontra hegemoni berarti menolak tatanan dominan sekaligus membangun kekuatan sosial-politik alternatif. Tujuan akhir dari proses ini adalah membentuk sebuah blok historis tandingan yang mampu menjadi dasar bagi lahirnya tatanan yang berbeda (Gill, 1993). Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks, pengaruh kekuasaan datang bukan hanya dari negara, melainkan juga dari aktor-aktor global seperti lembaga keuangan internasional, korporasi multinasional, dan media global. Oleh karena itu, strategi perlawanan harus dijalankan secara menyeluruh,

menjangkau level lokal hingga internasional, dan melibatkan narasi tandingan yang mampu bersaing di ruang publik global. Hal ini membutuhkan konsolidasi ide dan kekuatan yang mampu membentuk kesadaran kolektif.

Gramsci dan para pemikir sesudahnya juga menekankan pentingnya membongkar ideologi dominan yang tersembunyi dalam sistem politik yang tampaknya netral, seperti demokrasi liberal. Robinson, misalnya, mengkritik model *polyarchy*, yaitu demokrasi prosedural yang justru melanggengkan kepentingan kapitalisme global dan mempersempit ruang bagi perubahan struktural yang lebih dalam (Robinson, 1996). Dalam kerangka ini, peran strategis masyarakat sipil dan gerakan sosial terletak pada kemampuannya untuk mendekonstruksi model *polyarchy* tersebut, sekaligus mendorong lahirnya model alternatif yang berorientasi pada keadilan sosial melalui upaya perlawanan dan transformasi.

Konsep kontra hegemoni berfungsi sebagai alat analisis yang tajam untuk membedah relasi kuasa global, yang tidak hanya menjelaskan bagaimana sebuah tatanan dominan dipertahankan, tetapi juga bagaimana tatanan tersebut dapat ditantang, dilawan, dan diubah. Kerangka ini mempertajam analisis dengan memberikan pembeda yang jelas antara upaya perubahan struktural yang sejati dan reformasi superfisial yang justru melanggengkan status quo. Di tengah arena global yang kini semakin kontestatif dan penuh persaingan kepentingan, konsep ini menjadi penting

untuk menilai potensi sebuah inisiatif dalam mewujudkan tatanan yang lebih adil, inklusif, dan setara.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Struktur Historis

Konsep struktur historis digunakan dalam penelitian ini untuk memetakan bagaimana kekuasaan global terbentuk dan berfungsi dalam jangka panjang. Menurut Cox (1983), struktur historis terbentuk melalui interaksi antara kapabilitas material, ide, dan institusi yang saling menopang dalam membentuk tatanan dunia tertentu. Dalam konteks dominasi dolar Amerika Serikat, struktur ini tampak melalui peran sentral lembaga-lembaga seperti IMF dan Bank Dunia, serta penyebaran narasi stabilitas moneter yang berporos pada mata uang tersebut. Dedolarisasi oleh BRICS dapat dipahami sebagai respons terhadap struktur historis yang selama ini menopang dominasi dolar Amerika Serikat dalam sistem keuangan internasional. Secara operasional, penelitian ini membedah pergeseran struktur historis melalui tiga dimensi yang saling terkait. Pertama, pada dimensi material, analisis difokuskan pada pergeseran kekuatan ekonomi BRICS, seperti keunggulan di sektor berbasis inovasi dan pengurangan ketergantungan pada aset dolar dalam cadangan devisa (Chatterjee & Naka, 2022). Kedua, pada dimensi institusional, kemunculan lembaga seperti New Development Bank (NDB) dan mekanisme pembayaran alternatif yang dikembangkan secara kolektif dilihat sebagai fondasi tatanan alternatif.

Ketiga, aspek ideologis dikaji melalui narasi dominan yang seperti "multipolaritas" dan "kedaulatan moneter" yang diusung dalam pernyataan resmi BRICS (Spring-Ragain, 2025). Integrasi ketiga analisis ini menawarkan penilaian komprehensif tentang bagaimana konfigurasi kekuatan baru mulai menantang tatanan yang mapan.

1.6.2.2 Hegemoni

Dalam penelitian ini, hegemoni dipahami sebagai dominasi ekonomi Amerika Serikat dalam sistem keuangan global yang tercermin melalui posisi dolar AS sebagai mata uang utama dalam perdagangan internasional, cadangan devisa, serta aktivitas keuangan lintas negara. Dominasi dolar AS dalam sistem keuangan internasional menciptakan hubungan ketergantungan yang memperkuat posisi Amerika Serikat sebagai aktor hegemonik dalam tatanan ekonomi global (Petry & Nölke, 2024). Dalam perspektif Cox, hegemoni dipertahankan melalui kombinasi kapabilitas material, legitimasi ideologis, dan dukungan institusional internasional.

Dominasi dolar dalam penelitian ini digunakan sebagai konteks struktural untuk memahami munculnya strategi dedolarisasi BRICS. Secara operasional, kondisi hegemonik tersebut dilihat melalui keberlanjutan penggunaan dolar dalam pembayaran internasional, ketergantungan negara-negara terhadap infrastruktur keuangan global berbasis dolar, serta praktik ekonomi internasional yang masih menopang posisi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa dominasi dolar ditopang oleh kekuatan ekonomi

sekaligus oleh kebiasaan institusional dan kepercayaan pasar yang terbentuk dalam jangka panjang (Sanches, 2025).

Dalam kerangka Cox, dominasi ini dipahami sebagai bagian dari struktur historis yang dilegitimasi secara sosial dan institusional. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hegemoni ekonomi Amerika Serikat dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai fokus utama analisis, melainkan sebagai pijakan awal untuk membaca dinamika dedolarisasi BRICS sebagai bentuk respons terhadap struktur ekonomi global yang telah mapan.

1.6.2.3 Blok Historis

Blok historis dipahami dalam penelitian ini sebagai bentuk konsolidasi kekuatan sosial-politik yang mampu melahirkan tatanan alternatif terhadap sistem hegemonik yang berlaku. Gagasan ini, yang berakar pada pemikiran Antonio Gramsci dan diadaptasi ke level global oleh Cox (1987), menekankan pentingnya keterpaduan antara kapabilitas material (kekuatan ekonomi), bentuk-bentuk kelembagaan (termasuk negara), dan landasan ideologis dalam membentuk formasi kekuasaan yang stabil. Dalam konteks BRICS, pembentukan blok historis ditandai dengan penguatan visi bersama mengenai sistem dunia multipolar, serta pembangunan lembaga yang berfungsi di luar kerangka lembaga keuangan Barat. Blok historis juga mengandalkan solidaritas strategis di antara negara

anggota, yang menyatukan agenda ekonomi dengan arah perubahan politik jangka panjang.

Secara operasional, keberadaan blok historis dianalisis melalui seberapa jauh BRICS membentuk kesatuan arah dalam kebijakan ekonomi kolektif seperti negara-negara BRICS menegaskan tentang komitmen mereka untuk memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan pembiayaan lintas negara di luar kerangka Bretton Woods. Di sisi institusi, NDB dan CRA dipandang bukan semata penyedia dana, melainkan simbol kelembagaan dari formasi kekuatan baru. Pada dimensi ideologis, penelitian ini menelusuri konsistensi pesan-pesan resmi BRICS dalam menyuarakan dunia yang lebih adil, tidak sepihak, serta inklusif secara geopolitik (Qobo & Soko, 2015). Blok historis dalam perspektif Cox merujuk pada keterpaduan antara kekuatan material, institusi, dan ideologi yang menopang suatu tatanan hegemonik. Dalam konteks BRICS, pembentukan blok historis ditunjukkan melalui upaya membangun kerja sama ekonomi, institusi alternatif, dan narasi multipolaritas sebagai dasar bagi tatanan dunia yang lebih seimbang. Namun, pembentukan blok historis tidak berjalan linear dan bebas hambatan. Dalam kasus BRICS, perbedaan orientasi geopolitik dan kepentingan domestik dapat menghambat visi kolektif dan koordinasi strategis jangka panjang. Dalam penelitian ini, konsep blok historis tidak hanya merujuk pada BRICS sebagai kekuatan tandingan, tetapi juga pada tatanan yang hendak ditantang. Cox (1983) menggunakan konsep ini untuk menggambarkan kedua sisi secara dialektis,

yaitu blok historis yang menopang tatanan berbasis dolar dan blok historis yang sedang dibangun oleh BRICS. Dalam kerangka Cox (1983), keduanya tidak dapat dipisahkan karena blok tandingan terbentuk dalam relasi langsung dengan tatanan yang hendak diubahnya.

1.6.2.4 Kontra-Hegemoni

Kontra-hegemoni dalam penelitian ini didefinisikan sebagai strategi aktif dan terencana yang dilakukan oleh BRICS untuk melemahkan serta menantang dominasi sistem keuangan global yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Konsep ini menitikberatkan pada perjuangan ideologis dan institusional yang tidak bersifat frontal, melainkan melalui upaya sistemik untuk membangun alternatif yang kredibel dan dapat diterima secara luas (Gramsci, 1971). Dedolarisasi, dalam kerangka ini, tidak hanya dipahami sebagai kebijakan ekonomi, melainkan sebagai bagian dari war of position, sebuah pertarungan jangka panjang untuk melemahkan legitimasi ideologis dan teknokratis sistem dolar-sentris. Kontra-hegemoni menekankan niat politik BRICS untuk tidak sekadar bertahan dalam sistem, tetapi membangun alternatif terhadap arsitektur keuangan global yang didominasi Amerika Serikat.

Dalam praktiknya, kontra-hegemoni dioperasionalkan melalui berbagai dimensi. Dari sisi material, analisis diarahkan pada meningkatnya volume perdagangan antar negara BRICS yang tidak lagi menggunakan dolar, kesepakatan pertukaran mata uang bilateral, serta pengurangan

ketergantungan pada aset dolar dalam cadangan devisa. Pada elemen institusi, pendirian dan operasionalisasi lembaga seperti NDB dan CRA dianalisis sebagai alat untuk membangun otonomi finansial di luar pengaruh institusi Bretton Woods. Sedangkan dari segi ideologi, penelitian ini menganalisis pembentukan dan penyebaran narasi tandingan oleh BRICS melalui pidato resmi, media, dan komunikasi yang mengangkat tema seperti multipolaritas dan kedaulatan moneter. Semua dimensi ini membentuk fondasi dari proyek kontra-hegemonik yang dilakukan secara kolektif dan terarah. Dalam penelitian ini, kontra-hegemoni BRICS dioperasionalkan melalui war of position. Gramsci menjelaskan bahwa war of position adalah strategi yang dipilih ketika kekuatan tandingan belum cukup kuat untuk menghadapi tatanan yang ada secara langsung. Cox (1992) mengadaptasi konsep ini ke level tatanan global dengan menekankan bahwa pergeseran hegemoni terjadi melalui pembangunan alternatif material, institusional, dan ideologis secara bertahap.

Bagaimana strategi BRICS dalam mengurangi dominasi dolar AS dan implikasinya terhadap hegemoni ekonomi AS?

dijawab menggunakan



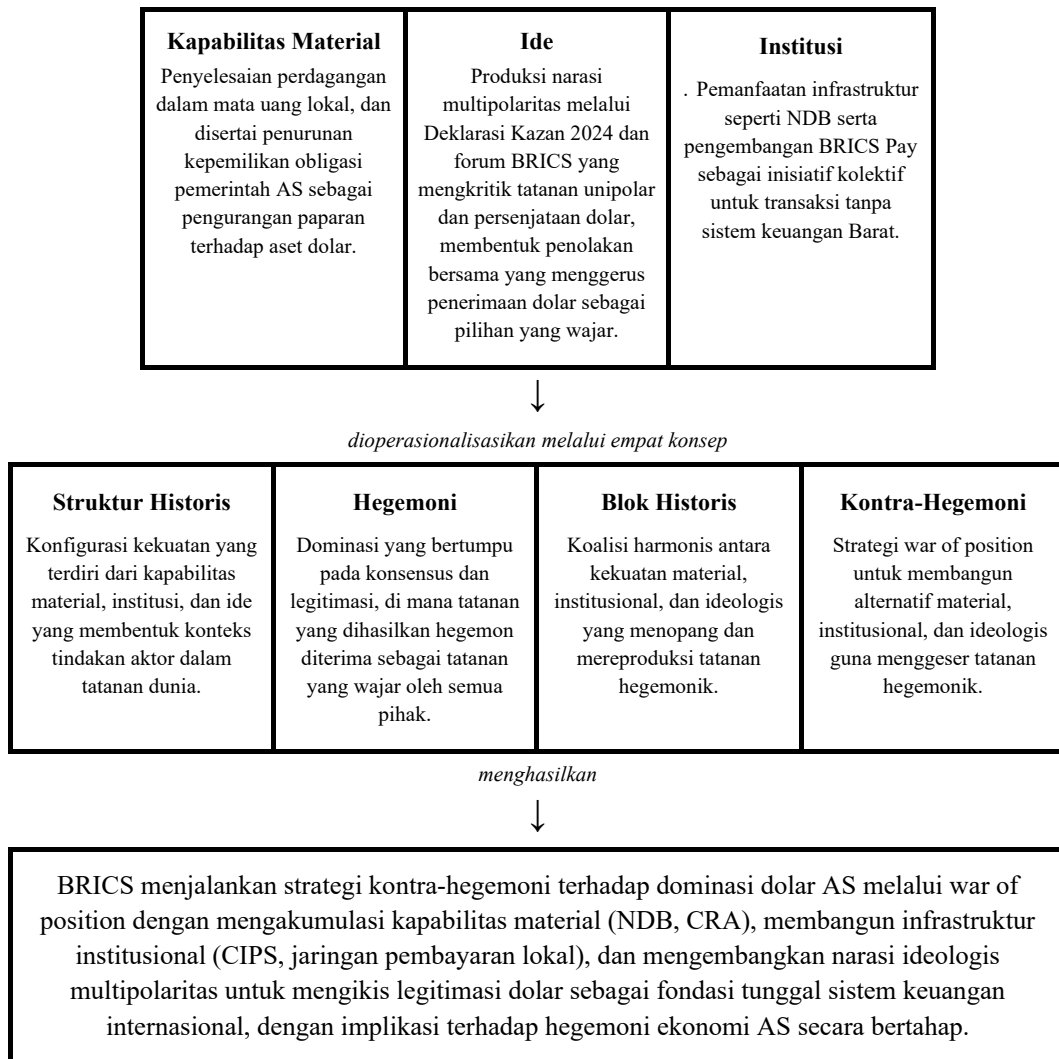
Teori Kritis Robert W. Cox

Robert W. Cox (1981, 1983, 1987)

Hegemoni terbentuk melalui konsensus material, institusional, dan ideologis, serta dapat ditantang melalui strategi kontra-hegemoni.

dioperasionalisasikan melalui tiga elemen





Gambar 1. 3 Kerangka Alur Pikir

Sumber : Diolah penulis berdasarkan pemikiran Cox (1981,1983,1987)

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa strategi dedolarisasi yang dilakukan oleh BRICS bukan sekadar langkah teknis untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar, melainkan merupakan bagian dari strategi politik kolektif yang menantang dominasi Amerika Serikat dalam tatanan keuangan global melalui *war of position* dalam kerangka Cox, yaitu melalui

pembangunan infrastruktur, institusi, dan narasi tandingan yang secara kumulatif menggeser fondasi tatanan yang ada.

Proses yang sedang berlangsung lebih tepat dipahami sebagai rekonfigurasi bertahap daripada penggantian sistem secara menyeluruh. Dolar masih mempertahankan posisinya sebagai mata uang dominan dalam transaksi global, sehingga dedolarisasi dalam konteks penelitian ini bukan berarti berakhirnya era dolar, melainkan melemahnya posisi monopolinya sebagai satu-satunya kerangka yang tersedia dalam sistem keuangan global.

Inisiatif-inisiatif BRICS seperti pendirian New Development Bank (NDB), penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan pembangunan infrastruktur pembayaran alternatif tidak berdiri sendiri, melainkan bergerak ke arah yang sama. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahwa sistem keuangan internasional tidak harus berpusat pada dolar, dan bahwa alternatif lain bukan hanya mungkin secara teknis tetapi juga semakin diterima secara politik. Implikasinya dirasakan bukan hanya pada tataran ekonomi, tetapi juga pada relasi kekuasaan dalam sistem keuangan internasional. Monopoli dolar yang selama ini berjalan nyaris tanpa pesaing kini harus berbagi ruang dengan sejumlah alternatif.

Melalui argumen ini, penelitian mengkaji bagaimana strategi dedolarisasi BRICS dijalankan dan bagaimana strategi tersebut memengaruhi hegemoni ekonomi Amerika Serikat. Pengaruh itu bukan terletak pada runtuhnya hegemoni, melainkan pada melemahnya konsensus yang selama ini membuat dolar diterima sebagai satu-satunya pilihan yang wajar.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis secara mendalam dinamika strategi dedolarisasi yang dilakukan oleh BRICS serta bagaimana upaya tersebut mencerminkan pembentukan struktur tandingan terhadap hegemoni global Amerika Serikat. Dengan menggunakan pendekatan teori kritis, khususnya perspektif Robert W. Cox, penelitian ini berusaha memahami relasi kuasa dalam sistem keuangan internasional yang berbasis ekonomi, sekaligus mencakup dominasi ideologis, institusional, dan budaya. Metode ini dipilih karena mampu menangkap makna, strategi, dan resistensi dalam konstruksi kekuasaan global, sebagaimana dijelaskan oleh Denzin dan Lincoln (2005), bahwa metode kualitatif berfokus pada pemahaman konteks sosial dan relasi kekuasaan secara mendalam.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat kualitatif eksplanatif yang berbasis teori (theory driven), sebagaimana pendekatan studi kasus eksplanatif yang dikembangkan Blatter dan Haverland (2012). Penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi fenomena, melainkan menjelaskan bagaimana strategi dedolarisasi BRICS bekerja terhadap struktur yang menopang dominasi dolar, dengan menurunkan ekspektasi teoritis dari kerangka Cox dan menelusuri kesesuaiannya dengan bukti empiris. Orientasi ini selaras dengan teknik analisis kongruen (Blatter & Haverland, 2012) yang digunakan pada tahap analisis data.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara desk research atau studi pustaka, dengan pengumpulan data dilakukan di Kota Semarang, terutama di lingkungan akademik Universitas Diponegoro. Lokasi utama yang mendukung proses pengumpulan data meliputi Perpustakaan FISIP UNDIP dan Perpustakaan Universitas Diponegoro. Meskipun fokus penelitian bersifat global, seluruh data dan analisis bersumber dari dokumen-dokumen resmi, jurnal ilmiah, laporan internasional, serta publikasi akademik yang dapat diakses dari sumber-sumber terpercaya.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek utama penelitian ini adalah BRICS sebagai pelaku kontra-hegemonik, sementara hegemoni ekonomi Amerika Serikat ditempatkan sebagai struktur dominan yang dihadapinya. Analisis difokuskan pada strategi dedolarisasi, pembentukan institusi keuangan alternatif, dan narasi ideologis yang mereka bangun. Kebijakan Amerika Serikat, termasuk sanksi dan instrumen finansial yang diarahkan untuk mempertahankan dominasi dolar, dianalisis bukan sebagai tindakan aktor yang setara, melainkan sebagai bagian dari struktur hegemonik yang direspons dan dimanfaatkan oleh BRICS. Dengan demikian, implikasi terhadap hegemoni Amerika Serikat dipahami sebagai turunan dari strategi BRICS, bukan sebagai hasil analisis terpisah atas perilaku Amerika Serikat.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif, menurut Creswell (2014), adalah data yang berbentuk narasi, teks, dan dokumen yang menggambarkan realitas sosial secara mendalam, bukan dalam bentuk angka. Bogdan dan Biklen (2007) menambahkan bahwa data kualitatif digunakan untuk memahami proses, makna, dan hubungan antara fenomena dalam konteks yang spesifik. Dalam penelitian, data berupa angka dan statistik turut dihadirkan sebagai pelengkap analisis kualitatif, sebagaimana Miles et al (2014) menyatakan bahwa kuantifikasi dan angka dapat digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis kualitatif.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah materi yang dikumpulkan dan dianalisis untuk pertama kalinya oleh peneliti guna menjawab tujuan penelitian yang spesifik, yang dapat berwujud dokumen dari riset arsip atau penelusuran media (Levitt et al., 2018). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh BRICS, New Development Bank, IMF, dan lembaga internasional lain yang relevan. Data ini meliputi laporan kebijakan, pernyataan resmi dalam KTT BRICS, dan arsip digital dari situs-situs resmi institusi global yang mengkaji sistem moneter internasional.

2. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari buku, artikel jurnal ilmiah, laporan think tank, serta publikasi media internasional yang kredibel. Informasi ini digunakan untuk memperkuat analisis konseptual mengenai hegemoni ekonomi AS, dedolarisasi, dan konsep blok historis. Sumber sekunder juga mencakup literatur terdahulu yang membahas strategi ekonomi-politik BRICS dalam konteks multipolaritas dan kontra hegemoni global (Yin, 2014).

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan penelusuran literatur dari berbagai basis data akademik dan repositori institusi internasional. Menurut Zed (2004), studi pustaka adalah metode yang bertujuan menelusuri pengetahuan yang telah tersedia dalam berbagai bentuk tulisan, termasuk jurnal, buku, laporan riset, dan dokumen resmi. Peneliti juga menggunakan teknik anotasi untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan dedolarisasi, BRICS, dan Teori Kritis Robert W. Cox.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kongruen sebagaimana dikembangkan oleh Blatter dan Haverland (2012). Teknik analisis kongruen bekerja dengan menghubungkan dan mencocokkan data empiris dengan ekspektasi teoritis yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga dapat dinilai sejauh mana kerangka teori

yang digunakan mampu menjelaskan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, ekspektasi tersebut diturunkan dari konsep-konsep Teori Kritis Cox, yaitu struktur historis, hegemoni, blok historis, dan kontra-hegemoni. Keempat konsep inilah yang menjadi acuan dalam membaca dan menginterpretasikan data empiris mengenai strategi dedolarisasi BRICS, yang bersumber dari dokumen resmi, laporan institusional, pernyataan kebijakan, serta jurnal akademik yang relevan dengan topik penelitian ini.

1.8.8 Kualitas Data (Good Criteria)

Untuk memastikan kualitas data, penelitian ini menggunakan kriteria kredibilitas dan keabsahan. Sumber-sumber yang digunakan telah diseleksi berdasarkan reputasi akademik dan relevansi dengan fokus penelitian, yakni strategi BRICS dalam dedolarisasi dan implikasinya terhadap tatanan global. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber serta pembacaan kritis terhadap konteks politik, ekonomi, dan ideologis dari masing-masing dokumen. Dalam paradigma kritis, data dipahami bukan hanya sebagai fakta objektif, tetapi sebagai hasil konstruksi sosial yang perlu dianalisis secara historis dan struktural.